



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PARIWISATA
KOTA BATU

RENCANA KERJA
(R E N J A)
—● TAHUN 2019 ●—

disparta
K O T A B A T U

Shining
Batu



KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata tahun 2019 dapat diselesaikan. Sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat RENJA, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batu Tahun 2019.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Dinas Pariwisata Kota Batu dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada tahun 2019, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam RENJA ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Selanjutnya kepada semua pihak khususnya pejabat struktural di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Batu beserta jajarannya yang telah bekerja keras menyusun dokumen RENJA ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kota Batu yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Kota Batu, 30 Oktober 2018

**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA BATU**

Drs. IMAM SURYONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630928 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	13
3.1.1. Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	13
3.1.2. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional.....	13
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	14
3.3. Program dan Kegiatan.....	15
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	16
BAB V PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batu tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pariwisata Kota Batu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2019. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2019 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Renja Kementerian Pariwisata dan Renja Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Pariwisata Kota Batu disusun berdasarkan Landasan Idiil Pancasila, UUD 45, serta Peraturan Perundang-undangan yang lain sebagai berikut :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
6. UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
7. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
8. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
13. Permenpar No. 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2015 - 2019
14. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025
17. Perda Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025.
18. Perda Propinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2019
19. Perda Kota Batu No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu 2010-2030.
20. Perda Kota Batu No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu tahun 2005-2025.
21. Perda Kota Batu No 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2007-2012.
22. Peraturan Walikota Batu 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2019 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat perubahan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Batu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2019 adalah :

1. Acuan Dinas Pariwisata dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Batu tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Batu.
2. Merumuskan program dan kegiatan kepariwisataan serta seni budaya di Kota Batu selama tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu Tahun 2019 terdiri dari 5 (lima) bab dan beberapa lampiran. Renja disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I LATAR BELAKANG

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

Menyajikan tabel perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum, seluruh target kinerja Dinas Pariwisata pada tahun 2017 telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja program pengembangan pemasaran pariwisata, yaitu cakupan wilayah pemasaran pariwisata, telah terealisasi 3 wilayah (lokal, nasional, internasional).

Untuk program pengembangan destinasi pariwisata, indikator kinerja “Persentase desa wisata dengan sarana prasarana yang memadai” pada tahun 2017 masih 0 (nol). Hal tersebut dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru dicantumkan pada dokumen Renstra Dinas Pariwisata tahun 2017-2022, dimana Dokumen Pengkriteriaan Desa Wisata yang menjadi dasar pengukuran indikator tersebut masih akan disusun pada tahun 2018.

Kemudian indikator kinerja yang kedua dalam program yang sama adalah “Persentase usaha pariwisata yang tersertifikasi” terealisasi sebesar 12,24% atau sebesar 12 usaha dari 98 usaha pariwisata yang ditargetkan.

Pada Program Pengembangan Kemitraan, terdapat 2 indikator kinerja. Indikator yang pertama adalah “Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi”, yang pada tahun 2017 terealisasi sebesar 100% atau sejumlah 40 orang. Kemudian indikator kedua adalah “Jumlah kelompok pengelola desa wisata maju”, yang pada tahun 2017 masih 0 (nol) karena indikator ini merupakan indikator baru yang data awalnya masih belum tersedia.

Pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya, terdapat 3 indikator kinerja. Indikator pertama, “Persentase nilai tradisi budaya yang teraktualisasi”, pada tahun 2017 terealisasi sebesar 100% atau sebanyak 1 event. Indikator kedua, “Persentase benda, situs, dan kawasan budaya yang dilestarikan”, pada tahun 2017 terealisasi 11,63% atau sejumlah 10 unit benda, situs dan kawasan cagar budaya yang pernah dilestarikan dari total 86 unit yang ada. Dan terakhir, indikator “Persentase kesenian yang teraktualisasikan”, terealisasi sebesar 100% pada tahun 2017 melalui penyelenggaraan event-event seni budaya dan pengiriman misi-misi kebudayaan ke luar daerah.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Batu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Kota Batu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target dan Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2										
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
2	16									
	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN									
2	16	13								
	Program Pembinaan dan Pengembangan Budaya	Persentase Benda, Situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	57,14	0	0	0	0	57,14	57,14	14,29
		Persentase seni budaya yang teraktualisasi (%)	100	0	0	0	0	100	100	25,00
2	16	13	01							
	Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai tradisional Daerah	Jumlah fasilitasi event nilai-nilai tradisional daerah (event)	3	0	0	0	0	3	3	0,75
2	16	13	02							
	Kegiatan Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan Daerah	Jumlah peserta bimtek pelestarian sejarah dan keurbakalaan (orang);	50	0	0	0	0	0	0	0,00
		Jumlah situs, benda, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)	20	0	0	0	0	11	11	2,75
2	16	13	03							
	Kegiatan Pelestarian Kesenian Daerah	Jumlah event kesenian daerah yang diikuti dan dilaksanakan (event)	22	0	0	0	0	22	20	5,00
		Jumlah aset/benda kesenian yang dikelola (unit)	1	0	0	0	0	0	0	0,00
		Jumlah Kelompok seni yang mendapat pembinaan (kelompok seni)	200	0	0	0	0	0	0	0,00
3										
	URUSAN PILIHAN									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target dan Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3	02										
3	02	01	BIDANG URUSAN PARIWISATA								
3	02	01	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja kepada aparatur internal dinas (%)	100	0	0	0	100	83	20,83
3	02	01	01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbentuk (dokumen)	6	0	0	0	7	1,75
					Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang terbentuk (dokumen)	4	0	0	0	4	1,00
3	02	01	02	Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen CALK yang terbentuk (dokumen)	1	0	0	0	1	0,00
3	02	01	03	Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan rutin dinas (bulan)	12	0	0	0	12	20,83
3	02	01	04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas pegawai dinas (orang/hari)	405	0	0	0	405	575,00
3	02	01	05	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	8	0	0	0	7	100,00
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	0	0	0	1	25,00
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	14	0	0	0	14	375,00
					Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (unit)	1	0	0	0	1	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target dan Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
3	02	10	Program Pembinaan Pengembangan Produk dan Destinasi Pariwisata	Persentase desa wisata dengan sarana prasarana yang memadai (%)	12,5	0	0	0	4,17	0	0,00		
				Persentase usaha pariwisata yang tersertifikasi (%)	18,37	0	0	0	0	15,31	15,31	382,75	
3	02	10	01	Kegiatan Pengembangan Objek & Daya Tarik Pariwisata	Jumlah sarana prasarana penunjang daya tarik wisata yang terbangun (unit)	2	0	0	0	0	0,00		
					Jumlah sarana prasarana penunjang daya tarik wisata yang terpelihara (unit)	6	0	0	0	0	1	2	50,00
3	02	10	02	Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa & Sarana Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi persyaratan dasar standarisasi (usaha pariwisata)	3	0	0	0	3	3	75,00	
					Jumlah pelaku usaha pariwisata yang telah mendapat pembinaan (pelaku usaha)	400	0	0	0	0	100	75	1875,00
3	02	11		Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Cakupan wilayah pemasaran wisatawan	3	0	0	0	2	2	50,00	
3	02	11	01	Kegiatan Pengembangan Informasi dan Analisa Pasar Pariwisata	Jumlah dokumen analisa data pemasaran pariwisata (dokumen)	3	0	0	0	0	0	0,00	
					Jumlah lembaga yang terhubung dalam Sistim Informasi Pariwisata (lembaga)	20	0	0	0	0	5	0	0,00
3	02	11	02	Kegiatan pengembangan promosi dan kerjasama bidang pariwisata	Jumlah hasil kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata (MoU)	1	0	0	0	0	0	0,00	
					Jumlah event wisata yang diikuti dan dilaksanakan (event)	7	0	0	0	0	6	6	150,00
					Jumlah media promosi pariwisata (media)	7	0	0	0	0	6	6	150,00
3	02	12		Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber	Persentase SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	60	0	0	0	60	0	0,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target dan Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	Daya Manusia Pariwisata	Jumlah lembaga pariwisata yang mendapat pembinaan (lembaga)	1	0	0	0	0	1	5	125,00		
3	02	12	01	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	Jumlah peserta pembinaan teknis kompetensi profesi SDM pariwisata (orang)	60	0	0	0	60	90	2250,00
3	02	12	02	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Pariwisata	Jumlah kelompok masyarakat pariwisata yang mendapat pembinaan (kelompok)	2	0	0	0	1	2	50,00

*) Data per tanggal 30 Oktober 2018

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, Gubernur, bupati/walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian sesuai dengan SPM Bidang Kesenian yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota. Dalam Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa target SPM adalah untuk tahun 2010-2014, namun indikator yang tercantum masih dianggap relevan sehingga masih digunakan oleh Dinas Pariwisata hingga tahun 2018.

Dalam peraturan menteri tersebut terdapat 7 indikator SPM yaitu : Cakupan Kajian Seni, Cakupan Fasilitasi Seni, Cakupan Gelar Seni, Misi Kesenian, Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian, Cakupan Tempat Kesenian, dan Cakupan Organisasi Kesenian. Diantara ketujuh indikator tersebut, rata-rata realisasi Cakupan Kajian Seni dalam 5 tahun masih sebesar 31,8%. Jauh di bawah target yang ditentukan dalam peraturan menteri sebesar 53%.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, terdapat 3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditangani oleh Dinas Pariwisata, yaitu Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, dan Jumlah kunjungan wisata (juta orang). Dimana capaian ketiga indikator tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Bahkan IKK Jumlah Kunjungan Wisata jauh melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 140% atau terealisasi sebesar 4,79 juta wisatawan dari target sebesar 3,41 juta wisatawan.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kota Batu

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				n-2	n-1	n	n+1	n-2	n-1	n	n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan Kajian Seni (%)	v		53	53	53	53	40	20	53	53	
2	Cakupan Fasilitasi Seni (%)	v		43	43	43	43	57	43	43	43	
3	Cakupan gelar seni (%)	v		75	75	75	75	75	100	75	75	
4	Misi kesenian (%)	v		100	100	100	100	100	0	100	100	
5	Cakupan sumber daya manusia kesenian	v		25	25	25	25	38	25	25	25	
6	Cakupan tempat kesenian	v		100	100	100	100	50	50	50	50	
7	Cakupan organisasi kesenian	v		100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		v	1	1	1	1	5	5	5	5	
9	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)		v	2	2	2	2	1	1	1	1	
10	Jumlah kunjungan wisata (juta orang)		v	3,22	3,41	5,26	5,79	3,97	4,79	5,26	5,79	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum, kinerja Dinas Pariwisata sangat baik, hal tersebut terlihat dari Jumlah Kunjungan Wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Rendahnya kesadaran pelaku usaha jasa pariwisata dalam standarisasi
2. Minimnya pemanfaatan potensi lokal dalam pengembangan daya tarik wisata
3. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM Pariwisata;
4. Rendahnya kesadaran SDM Pariwisata dalam sertifikasi kompetensinya
5. Promosi dan kerjasama pariwisata yang belum optimal;
6. Belum tersedianya informasi potensi pariwisata yang akurat dan akuntabel
7. Belum tersedianya Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan Daerah
8. Belum tersedianya sistem informasi kebudayaan daerah

Permasalahan dan hambatan tersebut diatas, jika tidak segera ditangani, maka akan berakibat pada menurunnya kinerja perangkat daerah. Yang pada akhirnya akan berimbas pada pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Berdasarkan telaah visi misi Kepala Daerah, telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi, serta telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka Dinas Pariwisata merumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata belum maksimal dan belum terintegrasi
2. Pengembangan Industri Pariwisata belum maksimal
3. Pengembangan Destinasi Pariwisata belum optimal
4. Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata yang belum maksimal
5. Pelestarian Kebudayaan yang belum maksimal dan belum terintegrasi

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil musrenbang tahun 2018, Dinas Pariwisata menampung 64 usulan dari desa/kelurahan yang terdiri dari 5 kegiatan konstruksi, 45 kegiatan bantuan alat kesenian dan sarana pariwisata, 9 kegiatan bimbingan dan pelatihan, dan 5 event.

Usulan berupa bantuan hibah tidak dapat dipenuhi dikarenakan penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Hasilnya, sebanyak 9 usulan akan dipertimbangkan dalam rencana kegiatan tahun 2019, dengan 5 kegiatan berupa pelatihan dan 4 kegiatan berupa event.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Batu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
216.13	Program Pembinaan dan Pengembangan Budaya				
216.13.03	Pelestarian Kesenian Daerah	Kota Batu	Jumlah event kesenian daerah yang diikuti dan	4 event	Festival Ngaglik; Festival Kampung Tani; Festival Brantas;

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dilaksanakan		Festival Kampung Anyar; (Musrenbang)
			Jumlah Kelompok seni yang mendapat pembinaan	200 kelompok seni	Pembinaan Kesenian; Pembentukan forum kesenian lokal; (Musrenbang)
302.12	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata				
302.12.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Pariwisata	Kota Batu	Jumlah kelompok masyarakat pariwisata yang mendapat pembinaan	2 kelompok	pelatihan peningkatan sdm / publik speaking / pengembangan kampung tematik untuk pengurus kampung ekologi; pelatihan manajemen event (event organizer); pelatihan guide wisata; (Musrenbang)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pola pengembangan pariwisata 2015-2019 didasarkan atas paradigma berkelanjutan dan peningkatan daya saing, di dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan empat pilar kepariwisataan sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, meningkatkan devisa pariwisata, meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, meningkatkan investasi bidang pariwisata, dan meningkatkan citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Sehingga tujuan dari pembangunan kepariwisataan sesuai dengan UU No. 10 tahun 2009 “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Untuk melaksanakan program-program pembangunan kepariwisataan sangat diperlukan adanya koordinasi lintas sektor yang efektif, termasuk koordinasi yang baik dengan daerah dan masyarakat karena pariwisata merupakan kegiatan yang multi sektor. Sektor ekonomi kreatif, merupakan sektor yang tidak bisa dipisahkan yang aktivitasnya saling berkaitan dengan pariwisata. Keberadaan sektor pariwisata akan menciptakan hubungan yang saling mendukung dan menguatkan (simbiosis mutualistis).

3.1.1. Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Pembangunan kepariwisataan Indonesia dilaksanakan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan ini meliputi: industri pariwisata; destinasi pariwisata; pemasaran; dan kelembagaan kepariwisataan.

3.1.2. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Arah kebijakan dihubungkan dengan program pembangunan pariwisata yang digariskan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), yang fokus pada program kegiatan pengembangan terhadap empat pilar pengembangan kepariwisataan, yaitu :

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Menciptakan, meningkatkan kualitas produk & pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

2. Pengembangan Industri Pariwisata

Mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, & pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

4. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Mengembangkan organisasi kepariwisataan, SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan & penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Cascading urusan wajib non pelayanan dasar kebudayaan

RPJMD Kota Batu 2018-2022	Misi 1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal
	Tujuan 1	Meningkatkan derajat kualitas hidup sosial masyarakat guna mewujudkan Batu Kota Nyaman
	Sasaran 1	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
Renstra Dinas Pariwisata	Tujuan	<u>Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah</u>
	Sasaran	<u>Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah</u>

Berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kota sebagaimana tersebut diatas, pada urusan wajib non pelayanan dasar kebudayaan, Dinas Pariwisata memfokuskan program dan kegiatannya pada pelestarian kebudayaan daerah dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Untuk itu dirumuskan tujuan pertama Dinas Pariwisata adalah, **“Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah”**. Tujuan tersebut untuk kemudian diturunkan dalam sasaran Dinas Pariwisata, **“Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam pelestarian Kebudayaan Daerah”**

Cascading urusan pilihan pariwisata

RPJMD Kota Batu 2018-2022	Misi 3	Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata
	Tujuan 3	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas berbasis pada sektor unggulan mewujudkan Batu Kota AgroWisata
	Sasaran 3	Meningkatnya aktivitas perekonomian sektor unggulan daerah yang inklusif berkelanjutan
Renstra Dinas Pariwisata	Tujuan	<u>Meningkatnya aktivitas perekonomian yang inklusif berkelanjutan pada sektor pariwisata</u>
	Sasaran	<u>Meningkatnya kualitas dan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal</u>

Berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kota sebagaimana tersebut diatas, pada urusan pilihan pariwisata, Dinas Pariwisata memfokuskan program dan kegiatannya pada pengembangan ekonomi masyarakat di sektor pariwisata berbasis kearifan lokal. Untuk itu dirumuskan tujuan Dinas Pariwisata, **“Meningkatnya aktivitas perekonomian yang inklusif berkelanjutan pada sektor pariwisata”**. Tujuan tersebut untuk kemudian diturunkan dalam sasaran Dinas Pariwisata, **“Meningkatnya kualitas dan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal”**

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan, secara umum Dinas Pariwisata berpedoman pada Dokumen Renstra Dinas Pariwisata yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Batu. Kemudian, untuk merumuskan kegiatan secara terperinci, Dinas Pariwisata mempertimbangkan faktor-faktor untuk mencapai indikator kinerja dalam rangka mencapai visi misi kepala daerah, hingga usulan dari masyarakat yang diperoleh melalui forum musrenbang.

Program dan Kegiatan pada 2019 :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
 - b. Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
 - d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah
2. Program Pembinaan Pengembangan Produk dan Destinasi Pariwisata
 - a. Pengembangan Objek dan Daya Tarik Pariwisata
 - b. Pengembangan Usaha Jasa & Sarana Pariwisata
3. Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata
 - a. Pengembangan Informasi dan Analisa Pasar Pariwisata
 - b. Pengembangan Promosi dan Kerjasama Bidang Pariwisata
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
 - a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Pariwisata
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Budaya
 - a. Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional Daerah
 - b. Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan Daerah
 - c. Pelestarian Kesenian

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2019, Dinas Pariwisata merencanakan 5 program dan 12 kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 9.025.589.600,- yang berasal dari APBD. Dengan rincian : 1 program 3 kegiatan untuk mendukung kegiatan rutin Dinas Pariwisata; 1 program 2 kegiatan untuk mendukung promosi dan pemasaran pariwisata baik ke dalam daerah maupun ke luar daerah; 1 program 2 kegiatan untuk mendukung pengembangan produk dan destinasi pariwisata, yang difokuskan pada pengembangan desa wisata; 1 program 2 kegiatan untuk mendukung pengembangan SDM Pariwisata yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kreatif; dan 1 program 3 kegiatan untuk memajukan kebudayaan daerah lokal.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Batu
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2020			
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
2	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN										
2	16	13	Program Pembinaan dan Pengembangan Budaya	Persentase Benda, Situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	57,14%	2.512.715.700		57,14%	4.855.000.000		
				Persentase seni budaya yang teraktualisasi	100%			100%			
2	16	13	01	Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai tradisional Daerah	Jumlah fasilitasi event nilai-nilai tradisional daerah	Kota Batu	3 event	542.479.000	APBD	4 event	750.000.000
					Jumlah peserta bimtek nilai tradisi		-			75 orang	
					Jumlah nilai tradisional yang terdokumentasikan		-			6 nilai tradisional	
2	16	13	02	Kegiatan Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan Daerah	Jumlah peserta bimtek pelestarian sejarah dan keurbakalaan	Kota Batu	50 orang	284.903.100	APBD	80 orang	275.000.000
					Jumlah situs, benda, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan		20 unit			10 unit	
2	16	13	03	Kegiatan Pelestarian Kesenian Daerah	Jumlah event kesenian daerah yang diikuti dan dilaksanakan	Dalam dan luar Kota Batu	22 event	1.685.333.600	APBD	22 event	3.830.000.000
					Jumlah aset/benda kesenian yang dikelola		1 unit			1 unit	
					Jumlah Kelompok seni yang mendapat pembinaan		200 kelompok seni			200 kelompok seni	
3	URUSAN PILIHAN										
3	02		BIDANG URUSAN PARIWISATA								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2020			
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
3	02	01		Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja kepada aparatur internal dinas		100%	1.421.621.030		100%	1.445.350.000
3	02	01	01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbentuk	Dinas Pariwisata	6 dokumen	-	APBD	6 dokumen	-
					Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang terbentuk		4 dokumen			4 dokumen	
3	02	01	02	Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen CALK yang terbentuk	Dinas Pariwisata	1 dokumen	-	APBD	1 dokumen	-
3	02	01	03	Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan rutin dinas	Dinas Pariwisata	12 bulan	1.069.487.950	APBD	12 bulan	1.073.350.000
3	02	01	04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas pegawai dinas	Dinas Pariwisata	405 orang/hari	15.500.000	APBD	405 orang/hari	46.600.000
3	02	01	05	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Dinas Pariwisata	8 unit	336.633.080	APBD	8 unit	325.400.000
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara		1 unit			1 unit	
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		14 unit			14 unit	
					Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi		1 unit			1 unit	
3	02	10		Program Pembinaan Pengembangan Produk dan Destinasi Pariwisata	Persentase desa wisata dengan sarana prasarana yang memadai		12,50%	1.493.706.048		12,50%	2.705.000.000
					Persentase usaha pariwisata yang tersertifikasi		18,37%			18,37%	
3	02	10	01	Kegiatan Pengembangan Objek & Daya Tarik Pariwisata	Jumlah sarana prasarana penunjang daya tarik wisata yang terbangun	Kota Batu	2 unit	865.769.048	APBD	32 unit	2.245.000.000
					Jumlah sarana prasarana penunjang daya tarik wisata yang terpelihara		6 unit			7 unit	
3	02	10	02	Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa & Sarana Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi persyaratan dasar standarisasi	Dalam dan luar Kota	3 usaha pariwisata	627.937.000	APBD	3 usaha pariwisata	460.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2020			
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Jumlah pelaku usaha pariwisata yang telah mendapat pembinaan	Batu	400 pelaku usaha				200 pelaku usaha			
3	02	11		Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Cakupan wilayah pemasaran wisatawan			3 wilayah	3.666.000.000		
3	02	11	01	Kegiatan Pengembangan Informasi dan Analisa Pasar Pariwisata	Jumlah dokumen analisa data pemasaran pariwisata	Kota Batu	3 dokumen	428.000.000	APBD	3 dokumen	416.000.000
					Jumlah lembaga yang terhubung dalam Sistim Informasi Pariwisata		20 lembaga			20 lembaga	
3	02	11	02	Kegiatan pengembangan promosi dan kerjasama bidang pariwisata	Jumlah hasil kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata	Dalam dan luar Kota Batu	1 MoU	2.567.166.222	APBD	3 MoU	3.250.000.000
					Jumlah event wisata yang diikuti dan dilaksanakan		7 event			8 event	
					Jumlah media promosi pariwisata		7 media			6 media	
3	02	12		Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata yang tersertifikasi		60 orang	602.380.600		60 orang	2.085.000.000
					Jumlah lembaga pariwisata yang mendapat pembinaan		1 lembaga			1 lembaga	
3	02	12	01	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	Jumlah peserta pembinaan teknis kompetensi profesi SDM pariwisata	Kota Batu	60 orang	285.073.400	APBD	60 orang	240.000.000
3	02	12	02	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Pariwisata	Jumlah kelompok masyarakat pariwisata yang mendapat pembinaan	Kota Batu	2 kelompok	317.307.200	APBD	2 kelompok	1.845.000.000
				JUMLAH				9.025.589.600			14.756.350.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata tahun 2019 merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun kedepan. Rencana Kerja ini adalah salah satu pedoman yang akan dipakai dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Batu.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini harus tunduk kepada kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diperlukan peran serta secara aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat dan penyelenggara pemerintah terutama segenap aparatur Dinas Pariwisata Kota Batu. Diperlukan rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan isu-isu strategis yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Renja 2019.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karena itu tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat berjalan secara optimal. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian :

1. Ketersediaan Dokumen Kriteria Desa Wisata.

Dokumen ini akan dijadikan dasar dalam standarisasi Desa Wisata yang *sustainable* dan sebagai alat untuk mengukur, memonitoring, dan mengevaluasi perkembangan Desa Wisata. Pengukuran indikator sasaran “Persentase perkembangan desa wisata berkategori desa wisata maju” sangat bergantung pada ketersediaan dokumen ini.

2. Ketersediaan Dokumen Analisa Pemasaran Pariwisata

Dokumen ini akan dijadikan dasar dalam menetapkan strategi pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien untuk tahun berikutnya. Dokumen ini sangat penting untuk mengembangkan paket wisata, target lokasi pemasaran yang potensial, hingga sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pembangunan pariwisata. Selain itu, perhitungan indikator sasaran Dinas Pariwisata “Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan” diharapkan dapat terpenuhi melalui ketersediaan dokumen ini.

3. Terbentuknya Sistem Informasi Pariwisata

Ketersediaan informasi yang akurat sangat vital dalam pengembangan pariwisata di Kota Batu. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan stakeholder pariwisata yang berperan aktif dalam pengembangan pariwisata. Melalui integrasi data dengan stakeholder pariwisata melalui pembentukan Sistem Informasi Pariwisata, diharapkan agar kebijakan pembangunan di bidang pariwisata dapat tepat sasaran.

4. Tersusunnya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.

Kendala yang selama ini dihadapi oleh pemerintah adalah belum terdapat peraturan perundangundangan yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional

Indonesia secara menyeluruh dan terpadu. Padahal, Kebudayaan sebagai ciri khas suatu daerah, menjadi daya tarik pariwisata yang berpotensi untuk dikembangkan.

Untuk itu, sesuai dengan amanat UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang disahkan tanggal 24 Mei 2017, maka Dinas Pariwisata mengadakan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagai langkah awal dari strategi pemajuan Kebudayaan Nasional dan sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, serta Perancangan Kerja Pembangunan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu Tahun 2019 ini dibuat, semoga dapat tercapai dan bermanfaat.

Batu, 30 Oktober 2018
Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kota Batu

Drs. IMAM SURYONO, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630928 199503 1 001